

Barometer Korupsi Global (BKG) 2009

Transparency International

Jakarta, 3 Juni 2009

Presentasi oleh :
Teten Masduki
Sekretaris Jenderal TI Indonesia

Apa itu BKG 2009?

- Adalah jajak pendapat umum berskala global tentang pandangan dan pengalaman berkaitan dengan korupsi.
- Dilaksanakan atas nama Transparency International oleh Gallup International
- Dilaksanakan di 69 negara termasuk Indonesia, terhadap 73.132 responden

Siapa yang disurvei?

- Masyarakat umum
- Kriteria responden: usia 16 tahun ke atas
- Masyarakat urban
- Indonesia: 500 responden
 - 300 di Jakarta
 - 200 di Surabaya
- Metode pengambilan sampel kuota, berdasarkan SUPAS BPS 2005

Pelaksanaan Survei

- Gallup International dan lembaga-lembaga afiliasinya sebagai bagian khusus dari “Voice of The People Survey”
- Pengumpulan data antara Oktober 2008 sampai dengan Maret 2009
- Di Indonesia, 11-20 November 2008

Apa yang Ditanyakan dalam Survei?

- Institusi apa yang dianggap paling korup?
- Apakah usaha pemerintah dalam memberantas korupsi sudah efektif?
- Pengalaman responden melakukan suap?
- Persepsi responden terhadap fenomena *state capture*?
- Pendapat masyarakat tentang ide membayar lebih terhadap perusahaan yang bersih?

Institusi Yang Diukur

- Ada 6:
 - Partai politik
 - Pegawai publik/pelayanan publik
 - Parlemen/legislatif
 - Bisnis/sektor swasta
 - Institusi peradilan
 - Media



- Institusi yang diukur pengalaman melaksanakan suap oleh responden:
 - Polisi
 - Pengadilan
 - Pelayanan bidang pertanahan
 - Registrasi dan perijinan
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pajak
 - Pelayanan umum



Temuan Global

1. Korupsi yang dilakukan di dan oleh swasta memprihatinkan publik umum

- Sektor swasta dianggap korup oleh separuh responden
- Publik bersikap kritis terhadap peran sektor swasta dalam proses pembuatan kebijakan negara
- Korupsi merupakan hal yang sangat memprihatinkan konsumen

Temuan Global

2. Partai politik dan pelayanan publik dipersepsikan sebagai sektor yang paling korup

- Mayoritas responden melihat parpol sebagai lembaga yang paling korup, disusul pelayanan publik
- Namun 13 negara melihat sektor swasta paling korup
- Sementara 11 negara melihat sektor peradilan yang paling korup

Temuan Global

3. Pengalaman suap skala kecil secara umum meningkat

- 1 dari 10 responden menyatakan pernah membayar suap dalam 12 bulan terakhir
- Negara paling banyak dipengaruhi suap skala kecil : Armenia, Azerbaijan, Irak, Kamerun, Kamboja, Liberia, Sierre Leone dan Uganda
- Kepolisian dilaporkan sebagai institusi yang paling mungkin menerima suap

- Namun di Timur Tengah dan Afrika Utara lembaga paling rawan suap adalah lembaga yang menangani jual-beli, waris dan sewa tanah.
- Keluarga berpenghasilan rendah cenderung untuk memberi suap pada saat berhubungan dengan polisi, peradilan, urusan pertahanan atau bahkan sistem pendidikan dibandingkan dari keluarga berpenghasilan tinggi

Temuan Global

4. Rakyat biasa tidak berdaya untuk bicara korupsi

- Tidak menggunakan saluran formal untuk menyampaikan keluhan mengenai suap
- Separuh dari korban penyuapan berpendapat bahwa mekanisme keluhan yang ada sekarang tidak efektif

Temuan Global

5. Pemerintah tidak menjalankan usaha pemberantasan korupsi secara efektif

- Masyarakat menilai upaya pemerintah untuk melawan korupsi tidak efektif
- Tidak ada perubahan besar yang terlihat mengenai upaya anti korupsi pemerintah

Temuan Spesifik Indonesia

- Parlemen adalah lembaga yang paling dipengaruhi korupsi, disusul institusi peradilan
- Sistem penilaian 1-5: 1=sama sekali tidak korup, 5=sangat korup

Partai Politik	Pegawai publik	Parlemen	Sektor bisnis	Institusi peradilan	Media
4,0	4,0	4,4	3,2	4,1	2,3

Temuan Spesifik Indonesia

- Responden di Indonesia melihat bahwa usaha pemberantasan korupsi sudah berjalan secara efektif:
 - *Bagaimana anda melihat usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan di negara anda:*
 - a. *Tidak efektif = 19%*
 - b. *Efektif = 74%*
 - c. *Tidak keduanya = 7%*

Perbandingan Skor Institusi di Indonesia dari tahun ke tahun

- Tidak banyak perubahan.
- Institusi yang dipersepsikan korup itu-itu saja

	2004	2005	2006	2007	2009
Partai politik	4,4 *	4,2 *	4,1	4,0	4,0
Legislatif	4,4 *	4,0	4,2*	4,1	4,4*
Kepolisian	4,2	4,0	4,2*	4,2*	-
Lembaga peradilan	4,2	3,8	4,2*	4,1	4,1

Tujuan BKG

- Masyarakat sipil, media, pelaku anti korupsi dapat menggunakan BKG sebagai acuan tentang institusi mana yang dipersepsikan korup
- Pembuat kebijakan dapat menggunakan BKG sebagai alat evaluasi dan acuan perubahan kebijakan dan perbaikan
- Peneliti dapat menggunakan BKG sebagai acuan awal untuk penelitian lebih mendalam tentang fenomena korupsi



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
Indonesia
the global coalition against corruption

Terima Kasih

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

**JL. SENAYAN BAWAH NO.17
JAKARTA 12180, INDONESIA**

Telp : 021 720 8515

Fax : 021 726 7815

Website : www.ti.or.id

Email : info@ti.or.id